



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RENCANA KERJA
2019

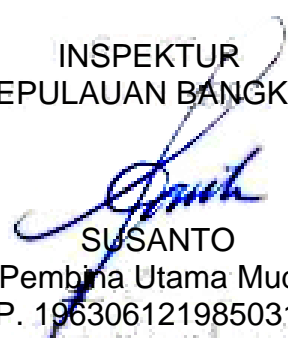
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kemudahan serta limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana kerja Tahun 2019 ini dibuat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap visi misi dan program prioritas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017 – 2022, sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Pada akhirnya Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memprioritaskan program pembangunan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai. Kiranya Allah SWT meridhoi segala upaya dan niat baik yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai amal ibadah untuk kita sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016) dan Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.....	33
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
 BAB V	
PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2018.....	11
Tabel 2.2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	27
Tabel 2.4.1.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	35
Tabel 3.2.1.	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Insektorat 2017-2022.....	43
Tabel 3.3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	43

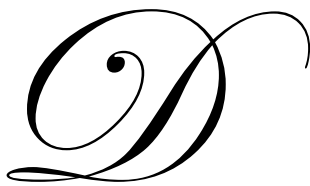
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
- Lampiran 2 Daftar Rasionalisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017
pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Lampiran 3 Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen
Perencanaan Tahun 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG



alam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dalam RPJMD 2017-2022 dan menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 terhadap visi misi dan program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, khususnya dalam bidang pengawasan maka perlu didukung dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tahun kedua Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja K/L terkait dan dipadukan dengan Rencana Kerja pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS hingga sampai dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2019.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam membantu tugas Gubernur di bidang pengawasan, sebagaimana Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang tidak secara langsung termasuk dalam lingkup Perangkat Daerah yang melaksanakan program pembangunan prioritas riil, namun tugas-tugas pendukung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakannya memiliki peran strategi dan signifikan dalam menciptakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas, bersih, responsif dan profesional. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Inspektorat dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai Perencanaan Kerja Jangka Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2019 yang terukur jelas sebagai dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- m. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
- n. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-

2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dimaksudkan sebagai wujud dukungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pelaksanaan program pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyusunan program kegiatan berbasis kinerja .

1.3.2. Tujuan

- a. Mengakomodir strategi perencanaan pembangunan untuk pendanaan program prioritas pembangunan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan tidak mengabaikan program/kegiatan prioritas maupun program nasional yang diamanatkan pemerintah pada Inspektorat daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinergikan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan program unggulan pembangunan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022 sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Tahun 2017 - 2022 yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah pada RKPD 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penguatan APIP, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2017) dan hasil capaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang telah direalisasikan melalui penetapan program/kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2012-2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2017) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, namun demikian secara bertahap dilakukan penyesuaian program dan kegiatan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pada Tahun Anggaran 2017, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan:

- • » 6 (enam) program dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dan terjadi penurunan dari tahun 2016 sebelumnya dengan 7 (tujuh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, yang terbagi dalam:
 - √ Terdiri dari 3 (tiga) program rutin dengan 22 (dua puluh dua) Kegiatan, dan

- √ 3 (tiga) program pembangunan strategis dengan 12 (dua belas) kegiatan sesuai kewenangan Inspektorat.

Namun demikian pada pertengahan Tahun anggaran 2017 terjadi defisit anggaran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengakibatkan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah dan dilakukan rasionalisasi anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan prioritas daerah serta perubahan kebijakan pembangunan daerah, dan setelah dilakukan rasionalisasi dalam DPPA Tahun Anggaran 2017, terjadi pengurangan pagu sebesar Rp. 857.544.750,- (*Delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau terjadi penurunan anggaran sebesar 9,91% dari anggaran awal DPA-PD induk sebesar Rp. 8.653.899.200,- (*Delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) dengan jumlah program dan kegiatan tetap.

Realisasi dan capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, dapat dilihat pada *lampiran 1 Laporan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2017* dan pada Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 (yang merupakan tahun berjalan).

Tabel 2.1.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2017
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (s.d. Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016 (Tahun n -3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (Tahun n -2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (Tahun n -2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2018
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
4	05	4	05				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN									
4	05	4	05	01			INSPEKTORAT DAERAH									
4	05	4	05	01	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah									
4	05	4	05	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan	10.419.101.297,50	1.631.511.226	1.776.618.000	1.668.457.585	94,44			

4	05	4	05	01	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	9.977.955.063	431.027.000	884.892.000	843.378.950	95,31			
4	05	4	05	01	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	407.090.000	65.100.000	N/A	N/A	-			
4	05	4	05	01	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) T.A. 2017 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/PKS)) T.A. 2016 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/ PKS/ Bimtek Ak. Akrua/Sistem PKPT berbasis Resiko)	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	4.923.219.000	1.049.152.600	618.724.850 ^{*)}	570.347.079	92,18			

4	05	4	05	01	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	294.487.500	N/A	23.650.000	20.255.000	85,64			
4	05	4	05	01	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	135.365.000	N/A	42.825.000	37.150.000	86,75			

4	05	4	05	01	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur										
4	05	4	05	01	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	530.027.000	309.774.252	129.600.000	92.598.470	71,45				
4	05	4	05	01	02	09	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	492.000.000	N/A	N/A	N/A	-				
4	05	4	05	01	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah										
4	05	4	05	01	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	2.902.372.000	483.109.200	530.672.750	522.066.240	98,38				

4	05	4	05	01	03	02	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	14.400.659.800	2.485.733.752	2.323.584.600	2.203.811.214	94,85			
4	05	4	05	01	03	03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	1.112.917.000	168.359.610	131.604.000	95.163.775	72,31			
							Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	765.078.800	N/A	142.118.000	114.010.200	80,22			

4	05	4	05	01	03	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	4.508.810.000	821.392.198	570.000.000	557.808.100	97,86			
4	05	4	05	01	03	05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	-	-	350.000.000	252.773.740	72,22			

4	05	4	05	01	03	06	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	150.080.000	143.433.775	149.820.000	139.157.157	92,88			
4	05	4	05	01	03	07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah <i>*) TA 2016 termasuk kegiatan Penanganan Kasus pd Wilayah Pemerintahan di bawahnya</i>	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/ daerah	1.098.850.000	138.948.600 *)	155.040.000	101.500.000	65,47			
4	05	4	05	01	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomidan Budaya									

4	05	4	05	01	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	-	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	04	06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	-	N/A	N/A	N/A	N/A			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (s.d. Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016 (Tahun n -3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (Tahun n -2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (Tahun n -2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2018
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
4 05							FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN								
4 05	01						INSPEKTORAT DAERAH								
4 05	01	01					INSPEKTORAT DAERAH								

4	05	4	05	1	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah									
4	05	4	05	1	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan	10.080.674.030					1.500.074.030	1.500.074.030	15%
4	05	4	05	1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	33.455.060.000					592.460.000	592.460.000	2%
4	05	4	05	1	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	514.813.000					123.540.000	123.540.000	24%
4	05	4	05	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur *) T.A. 2017 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/PKS) *) T.A. 2016 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/ PKS/ Bimtek Ak. Akrual/Sistem PKPT berbasis Resiko)	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	3.270.789.000					440.813.000	440.813.000	13%

4	05	4	05	1	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	155.250.000					19.462.000	19.462.000	13%
4	05	4	05	1	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	394.775.000					44.523.000	44.523.000	11%
4	05	4	05	1	02		Prog. Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur									
4	05	4	05	1	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1.696.000.000					203.920.000	203.920.000	12%

4	05	4	05	1	02	09	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	662.650.000					60.250.000	60.250.000	9%
4	05	4	05	1	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah									
4	05	4	05	1	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	2.892.850.000					380.774.000	380.774.000	11%
4	05	4	05	1	03	02	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaaan Kinerja	15.471.000.000					2.779.720.000	2.779.720.000	18%

4	05	4	05	1	03	03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	1.508.174.000					153.719.000	153.719.000	10%
							Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	1.939.625.000					N/A	N/A	N/A
4	05	4	05	1	03	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	3.765.444.000					441.624.000	441.624.000	12%

4	05	4	05	1	03	05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	1.912.000.000					203.076.000	203.076.000	11%
4	05	4	05	1	03	06	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	896.918.000					81.200.000	81.200.000	9%
4	05	4	05	1	03	07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah <i>*) TA 2016 termasuk kegiatan Penanganan Kasus pd Wilayah Pemerintahan di bawahnya</i>	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	1.208.779.000					93.375.000	93.375.000	8%

4	05	4	05	1	04		Prog. Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomidan Budaya									
4	05	4	05	1	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	1.381.407.000					246.780.000	246.780.000	17%
4	05	4	05	1	04	06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	862.000.000					146.620.000	146.620.000	17%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa format isian tabel di atas mengacu pada Program dan Kegiatan serta Indikator dalam RPJMD Tahun 2017-2022, namun demikian untuk Program dan Kegiatan serta Indikator program dan kegiatan tahun 2016 dan 2017 telah diselaraskan/disesuaikan dengan indikator program dan kegiatan pada Renstra tahun 2017-2022.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Semua program mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 90%, (*yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, Program Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan serta Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 dikelompokkan ke dalam 1 (satu) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan*).
- b. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 8 (delapan) kegiatan juga mencapai target di atas 90%, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 berubah nomenklatur menjadi Program Pengawasan dan pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*
- c. *Program Penataan Kebijakan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan reformasi Birokrasi dengan 2 (dua) kegiatan, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 berubah nomenklatur menjadi Program Pengawasan dan pembinaan Pemerintahan dan Aparatur mencapai target di atas 80%.*

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas rata-rata adalah adanya komitmen yang kuat dari semua elemen Perangkat Daerah dalam memedomani Renstra, Renja, Tapkin dan IKU yang sudah ditetapkan, sehingga target dapat tercapai dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan revidi dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Indikator kinerja Kunci Rencana Strategis 2012-2017 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait dengan kinerja pelayanan disajikan dalam Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	T.A. 2016 & 2017											
1	Indeks Reformasi Birokrasi			65,00	68,54 ^{*)}	73,39 ^{*)}	73,41 ^{*)}	79,9				^{*)} Pada Tahun 2018-2019 terdapat dalam target Indikator tujuan RPJMD
2	Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (A) atau (B)			75,00%								
3	Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah			98,00%								

	atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.											
4	Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.			97,00%								
5	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat			100%	100%			100%				
6	Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Pengadaan Barang dan Jasa: a. Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b. Sertifikasi Pengadaan			8 orang 7 orang								

	Barang dan Jasa											
	T.A. 2018 & 2019											
7	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan			-	30	27	25	33,74	-	27	25	
8	Nilai Capaian Maturitas SPIP			-	3-3,99	3-3,99	3-3,99	2-2,99	-	3-3,99	3-3,99	
9	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"			-	80,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	
10	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/WBBM				2	3	5		N/A	3	5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada Tahun 2017, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan langkah-langkah strategis dalam bidang pengawasan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori tugas pengawasan, yaitu:

A. Kinerja Rutin Pengawasan, dengan capaian program:

1. Reviu RPJMD,
2. Reviu RKPD,
3. Reviu KUA-PPAS
4. Reviu RKA SKPD,
5. Reviu LKPD,
6. Reviu Laporan Kinerja (capaian nilai B Tahun 2016, Target nilai A pada Tahun 2017)
7. Reviu penyerapan anggaran dan reviu penyerapan PBJ, pemeriksaan reguler perangkat daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak, evaluasi SPIP, evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP

B. Pengawasan Prioritas Program Nasional

1. Monitoring dan evaluasi dana desa dan dana BOS
2. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
3. Operasionalisasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (bersama dengan Polda Babel dan stakeholder lainnya)
4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

C. Pengawasan Reformasi Birokrasi

1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (capaian program nilai 58,55)
2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik

D. Pengawasan Reformasi Birokrasi

1. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Monitoring evaluasi aksi Pencegahan Korupsi

2. Verifikasi LHKPN/LHKASN
3. Penilaian internal ZI, *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan dan Penanganan laporan gratifikasi

Hal terpenting dalam capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2017 untuk pencapaian kinerja pembangunan prioritas program nasional adalah:

1. Tercapainya peningkatan level Kapabilitas APIP dari LEVEL 2 menjadi LEVEL 3 sebagaimana target yang dicanangkan oleh pemerintah hingga Tahun 2019 dalam RPJMN
2. Tercapainya peningkatan Level Kematangan Maturitas SPIP dari LEVEL 1 menjadi LEVEL 2 (dengan nilai 2,40), yang merupakan pencapaian yang signifikan, dan akan terus diupayakan menuju level 3 hingga 2019.
3. Hal tak kalah pentingnya adalah pencapaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Zona Merah dan Kuning menjadi Zona Hijau dengan hasil penilaian MEMUASKAN dari Itjen Kementerian Dalam negeri.
4. Terbentuknya SISATGAS SPIP Inspektorat yang diproyeksikan pembentukan Satgas SPIP pada setiap perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Terlaksananya kegiatan SPIP dan Konsultasi Audit pada Tahun 2018 serta asistensi binwas dan pendampingan APIP pada setiap Perangkat Daerah.

Selain itu tercapainya Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Tahunan antara Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 22 Desember 2017 terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di samping untuk menyamakan persepsi terkait Pelaksanaan Pengawasan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih dari itu, tercapainya kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen K/L teknis lainnya pada Rakorwasdanas dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi dalam hal penetapan kebijakan dan program pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat dalam penguatan peran kelembagaan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2017 adalah masih seputar kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan, kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi teknis tertentu/spesialisasi khusus serta sarana/prasarana yang belum memadai, sehingga Inspektorat harus berupaya keras untuk meningkatkan APIP sebagai media *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* dalam memberikan keyakinan yang memadai dan peran konsultasi dalam tugas pembinaan dan pengawasan.

Hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja Inspektorat yang pada akhirnya akan berdampak pada dukungan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Oleh karena itu, secara kelembagaan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki peran strategis namun mempunyai tugas berat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sekaligus mendorong Perangkat Daerah agar mau bersama-sama meningkatkan kinerja dan transparansi serta memaksimalkan pelayanan publik. Beberapa hal penting menjadi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti guna perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berjalan dan selanjutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD 2017 ditetapkan sebesar Rp. 8.653.899.200,00 (dengan 6 program dan 34 kegiatan), namun setelah dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap belanja langsung pada anggaran perubahan anggaran Tahun 2017, maka anggaran belanja langsung keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 7.796.354.450,00 (6 program dan 34 kegiatan), terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 857.544.750 atau sebesar 9,91% yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 (*daftar rasionalisasi anggaran belanja langsung tahun 2017 terlampir pada lampiran 2*).

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan Rancangan RKPD awal Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD 2018 ditetapkan sebesar Rp. 7.513.930.030,00 (terdapat 3 program 17 kegiatan) dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. – (belum mencapai Triwulan I) dengan prosentase sebesar -%.

Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan bahwa dari Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dalam RKPD Tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur program dan beberapa kegiatan rutin dari semula 6 (enam) hingga 7 (tujuh) program berubah menjadi hanya 3 (tiga) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan sesuai dengan Lingkup Tanggung Jawab pejabat eselon III dan eselon IV yang terdapat di Inspektorat Daerah, namun penurunan program dan kegiatan tidak secara signifikan mengurangi jumlah nominal anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar pada Tahun 2018 dari tahun sebelumnya. (*Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022 dapat dilihat pada Lampiran 3 Dokumen Renja ini*)

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dan disajikan dalam Tabel 2.4.1. sedangkan Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022 dapat dilihat pada *Lampiran 3* dalam Dokumen Renja ini.

Tabel 2.4.1.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,852,000,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,852,000,000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	1,613,960,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	1,613,960,000	

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	95 Orang	123,540,000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	85 Orang	123,540,000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	646,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	646,000,000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	31,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	31,000,000	

6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	62,000,000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	62,000,000	
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	227,500,000,00	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 laporan	227,500,000,00	
8	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lakip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	176.000.000,00	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lakip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	176.000.000,00	

9	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan	82,000,000	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan	82,000,000	
10	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja ZI	5 unit kerja	200.00.000,00	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja ZI	1 unit kerja	200.00.000,00	
11	Monev/Penendalian Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	150.000.000,00	Monev Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	150.000.000,00	
12	Penanganan whistle Blower System	Pangkalpinang	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	105.000.000,00	Penanganan whistle Blower System	Pangkalpinang	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	105.000.000,00	
13	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	seluruh PD Pemprov	262.500.000	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	seluruh PD Pemprov	262.500.000	
14	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		350.000.000	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	-	350.000.000	

15	Sosialisasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah sosialisasi SPIP	4 kali sosialisasi dalam setahun	0	Sosialisasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah sosialisasi SPIP	4 kali sosialisasi dalam setahun	0	
16	Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah Monev SPIP	4 kali	145.000.000	Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah Monev SPIP	4 kali	145.000.000	
17	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	160.000.000	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	160.000.000	
18	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pangkalpinang	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	150 Obrik	2,940,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pangkalpinang	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	140 Obrik	2,940,000,000	
19	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	150 Obrik	0	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	140 Obrik	0	

20	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	150 Obrik	635,000,000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	140 Obrik	635,000,000	
21	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	170,436,000	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	170,436,000	
22	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 rakor 1 PKPT	176,970,000	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 rakor 1 PKPT	176,970,000	

23	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	15%	420,000,000	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	10%	420,000,000	
24	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	15 laporan pengaduan	125,000,000	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	10 laporan pengaduan	125,000,000	
25	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	300,000,000	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	300,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah diamanatkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Dalam RPJMN 2015-2019 tahapan pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara yang mampu mendukung pembangunan nasional. Salah satu agenda pokok adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif, yang sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019 dan sejalan dengan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Renstra inspektorat 2017-2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai penguatan pengawasan pada komponen proses IRB	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	30	27	25	23	20
			Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Nilai capaian Maturitas SPIP	3 s.d. 3.99	3 s.d. 3.99	3 s.d. 3.99	3 s.d. 3.99	4 s.d. 4.99
			Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	100	100	100	100
			Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM	2	3	5	5	5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan pencapaian strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Mendorong Percepatan dan peningkatan penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik, mulai dari program perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset hingga monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pihak- pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pembinaan secara kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Audit, Reviu, konsultasi, pemantauan dan pengawasan lain, baik pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, reviu terhadap LKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Melakukan evaluasi yang lebih fokus dan berkualitas terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaporan dan kotak pengaduan;
6. Penyelesaian Tindak Lanjut secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil temuan pengawasan;
7. Memberikan kesempatan kepada tenaga aparatur pengawas dan

auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Untuk mencapai strategi di atas, ditetapkan kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Memaksimalkan sistem Satuan Tugas SPIP (SISATGAS SPIP) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Memaksimalkan Peran APIP sebagai katalis dalam pendampingan dan asistensi serta memperbanyak volume konsultasi kepada setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara lebih *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang berasaskan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi teknis keahlian tertentu.

Strategi dan kebijakan yang diambil berpedoman pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif atas strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran,

maka dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif

Sasaran :

- a. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP
- b. Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM
- ❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :*
 - a) Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b) Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota
 - c) Penyusunan laporan Tim Aksi PPK daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d) Penilaian Internal Zona Integritas
 - e) Monev/Pengendalian Laporan Gratifikasi
 - f) Penanganan whistle Blower System
 - g) Pembinaan dan penyusunan pelaporan LHKPN

Sasaran :

Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

- ❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya, dengan 6 (enam) kegiatan yaitu :*
 - a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b) Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah
 - c) Sosialisasi SPIP
 - d) Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP
 - e) Peningkatan Aplikasi Sistem Pengawasan
 - f) Konsultasi Audit.

Sasaran :

Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:*

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- d) Pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah;
- e) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;
- f) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda;
- g) Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan rencana program dan kegiatan yang merupakan rutin operasional kantor/organisasi adalah sebagai berikut, yaitu:

Tujuan umum: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

Sasaran Umum: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

❖ *Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan , dengan 6 (enam) kegiatan, yaitu:*

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan disiplin aparatur;
- d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- f) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pada Program ini terjadi eskalasi kenaikan anggaran yang signifikan,

dikarenakan adanya rencana usulan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor yang sudah deadline berdasarkan DED yang telah dilaksanakan Tahun anggaran 2015.

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan guna menjalankan dan melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan di atas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Secara singkat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada inspektorat Daerah

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2020 Rencana Tahun 2020	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	05						FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN								
4	05	01					INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	01	01				INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	4	05	01	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan; Nilai SAKIP Inspektorat		80%; 85					
4	05	4	05	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Pangkalpinang	100%	1,852,000,000	APBD		100%	2,050,000,000

4	05	4	05	01	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	Pangkalpinang	100%	1,613,960,000	APBD		100%	7,961,000,000
4	05	4	05	01	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	Pangkalpinang	95 Orang	123,540,000	APBD		95 Orang	95,256,000
4	05	4	05	01	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	Pangkalpinang	100%	646,000,000	APBD		100%	689,000,000
4	05	4	05	01	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Pangkalpinang	4 Dokumen	31,000,000	APBD		4 Dokumen	32,000,000
4	05	4	05	01	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	Pangkalpinang	7 Laporan	62,000,000	APBD		7 Laporan	84,000,000

4	05	4	05	01	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Prosentase Tingkat Capaian OPD dengan Laporan Kinerja Baik		80%					
4	05	4	05	01	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang	4 laporan	227,500,000,00	APBD		4 laporan	363,000,000
							Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./Kota	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Pangkalpinang dan Kabupaten	8	176.000.000,00	APBD		8	300.000.000,00
4	05	4	05	01	02	09	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	Pangkalpinang	4 laporan	82,000,000	APBD		4 laporan	140,000,000,00
							Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	Pangkalpinang dan Kabupaten	4 Unit Kerja	200.00.000,00	APBD		5 Unit Kerja	250.000.000,00
							Monev/Pengendalian Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang	12 Laporan	150.000.000,00	APBD		12 Laporan	165.000.000,00
							Penanganan Whistle Blower System	Jumlah Laporan Pengaduan melalui WBS	Pangkalpinang	12 Laporan	105.000.000,00	APBD		12 Laporan	135.000.000,00

4	05	4	05	01	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti; Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah; Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	95%; 98%; 90%							
							Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	Pangkalpinang dan Kabupaten dan Jakarta	150 Obrik	2,940,000,000	APBD		150 Obrik	3,087,000,000	
							Tindak Lanjut Hasil pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	Pangkalpinang dan Kabupaten dan Jakarta	150 Obrik	0	APBD		150 Obrik	472,500,000	
							Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	Pangkalpinang	150 Obrik	635,000,000	APBD		150 Obrik	800,000,000	

							Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	Pangkalpinang	100%	170,436,000	APBD		100%	178,957,000
							Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	Pangkalpinang dan Kabupaten	2 rakor 1 PKPT	176,970,000	APBD		2 rakor 1 PKPT	329,000,000
4	05	4	05	01	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	Pangkalpinang	15%	420,000,000	APBD		15%	611,100,000
4	05	4	05	01	03	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	Pangkalpinang	15 laporan pengaduan	125,000,000	APBD		15 laporan pengaduan	270,112,000
4	05	4	05	01	03	03	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	Pangkalpinang	2 laporan	300,000,000	APBD		2 laporan	417,000,000
4	05	4	05	01	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomidan Budaya	Peningkatan Capaian Level Kapabilitas APIP; Peningkatan Capaian Level Maturtas SPIP	4;3						

4	05	4	05	01	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	Pangkalpinang	42 PD	262.500.000	APBD		42 PD	275.625.000
							Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Pangkalpinang	100 peserta	350.000.000	APBD		100 peserta	375.000.000
							Sosialisasi SPIP	Jumlah sosialisasi SPIP	Pangkalpinang	4 kali sosialisasi dalam setahun	0			4 kali sosialisasi dalam setahun	165.000.000
							Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Jumlah Monev SPIP	Pangkalpinang	4 kali	145.000.000			4 kali	158.000.000
4	05	4	05	01	04	06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	Pangkalpinang	seluruh PD Pemprov	160.000.000			seluruh PD Pemprov	172.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen rencana kerja dalam periode 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran yang disusun dengan memedomani Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 sampai dengan periode Triwulan I yang telah dilaksanakan.

Namun demikian, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagai wujud dukungan dan komitmen Inspektorat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat bantu *“tools”* dalam rangka menyelaraskan program/kegiatan di Inspektorat dengan visi misi dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Tahun Tahun 2017 – 2022.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan sehingga akan mencapai target program/kegiatan dan kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Pangkalpinang, Juni 2018

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196306121985031001

L
a
m
p
i
r
a
n

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		20,799,325,885	19,073,289,944	100.00	17,859,849,658	93.64	1,213,440,286	6.36
I	Belanja Tidak Langsung	12,145,426,685	11,276,935,494	100.00	10,641,372,148	94.36	635,563,346	5.64
	a. Gaji, Tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan	5,614,654,685	4,890,799,494	100.00	4,695,339,348	95.93	195,460,146	4.00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	6,530,772,000	6,386,136,000	100.00	5,946,032,800	92.14	440,103,200	6.89
II	Belanja Langsung	8,653,899,200	7,796,354,450	100.00	7,218,477,510	92.69	577,876,940	7.41
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,890,490,000	1,766,618,000	100.00	1,668,457,585	94.44	98,160,415	5.56
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,000,000	36,000,000	100.00	30,701,375	85.28	5,298,625	14.72
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	200,000,000	167,000,000	100.00	152,271,826	91.18	14,728,174	8.82
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	280,000,000	228,128,000	100.00	198,441,100	86.99	29,686,900	13.01
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	138,000,000	138,000,000	100.00	114,870,000	83.24	23,130,000	16.76
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20,000,000	20,000,000	100.00	11,135,000	55.68	8,865,000	44.33
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25,000,000	20,000,000	100.00	12,663,000	63.32	7,337,000	36.69
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	136,000,000	136,000,000	100.00	135,608,050	99.71	391,950	0.29
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	15,000,000	100.00	13,574,750	90.50	1,425,250	9.50
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,000,000	17,000,000	100.00	16,346,000	96.15	654,000	3.85
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13,600,000	13,600,000	100.00	12,690,000	93.31	910,000	6.69
	11. Penyediaan bahan logistik kantor	21,800,000	29,800,000	100.00	29,372,500	98.57	427,500	1.43
	12. Penyediaan Makanan dan minuman	36,000,000	36,000,000	100.00	34,846,310	96.80	1,153,690	3.20
	13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000	350,000,000	100.00	346,541,074	99.01	3,458,926	0.99
	14. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adm. Perkantoran	460,090,000	460,090,000	100.00	460,000,000	99.98	90,000	0.02
	15. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	150,000,000	100,000,000	100.00	99,396,600	99.40	603,400	0.60
	B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	784,750,000	884,892,000	100.00	843,378,950	95.31	41,513,050	4.69
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	88,700,000	133,842,000	100.00	131,022,000	97.89	2,820,000	2.11
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63,000,000	178,000,000	100.00	177,597,950	99.77	402,050	0.23
	3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36,600,000	36,600,000	100.00	36,413,300	99.49	186,700	0.51
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40,000,000	20,000,000	100.00	19,898,900	99.49	101,100	0.51
	5. Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	556,450,000	516,450,000	100.00	478,446,800	92.64	38,003,200	7.36

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,875,000	66,475,000	100.00	57,405,000	86.36	9,070,000	13.64
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,050,000	23,650,000	100.00	20,255,000	85.64	3,395,000	14.36
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	42,825,000	42,825,000	100.00	37,150,000	86.75	5,675,000	13.25
	D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,807,639,350	4,226,419,350	100.00	3,870,533,269	91.58	355,886,081	8.42
	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	2,523,584,600	2,323,584,600	100.00	2,203,811,214	94.85	119,773,386	5.15
	2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	285,040,000	155,040,000	100.00	101,500,000	65.47	53,540,000	34.53
	3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	142,118,000	142,118,000	100.00	114,010,200	80.22	28,107,800	19.78
	4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	299,224,000	131,604,000	100.00	95,163,775	72.31	36,440,225	27.69
	5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	550,000,000	570,000,000	100.00	557,808,100	97.86	12,191,900	2.14
	6. Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	25,000,000	23,400,000	100.00	23,400,000	100.00	-	0.00
	7. Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR	632,672,750	530,672,750	100.00	522,066,240	98.38	8,606,510	1.62
	8. Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	350,000,000	350,000,000	100.00	252,773,740	72.22	97,226,260	27.78
	E. Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	593,724,850	572,530,100	100.00	546,947,079	95.53	25,583,021	4.47
	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	500,000,000	491,805,250	100.00	484,228,430	98.46	7,576,820	1.54
	2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	93,724,850	80,724,850	100.00	62,718,649	77.69	18,006,201	22.31
	F. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	479,420,000	279,420,000	100.00	231,755,627	82.94	47,664,373	17.06
	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	329,600,000	129,600,000	100.00	92,598,470	71.45	37,001,530	28.55
	2. Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	149,820,000	149,820,000	100.00	139,157,157	92.88	10,662,843	7.12

DAFTAR RASIONALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2017
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Perangkat Daerah: **INSPEKTORAT DAERAH**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Anggaran Tahun 2017									
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target		Pagu Indikatif			
									Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	KUPA-PPAS	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	
1	20					OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
1	20	1	20	07	01	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran												
1	20	1	20	07	01	0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya, serta paket/ pengiriman		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik telekomunikasi dan informasi		Gedung Kantor Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	200,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	-33,000,000.00
1	20	1	20	07	01	0600 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	280,000,000.00	228,128,000.00	228,128,000.00	-51,872,000.00
1	20	1	20	07	01	0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	0800 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya operasional kebersihan kantor		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-5,000,000.00
1	20	1	20	07	01	1000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	1100 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	1200 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	9,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	8,000,000.00
1	20	1	20	07	01	1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah sebagai sarana informasi		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	1600 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	21,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00	8,000,000.00
1	20	1	20	07	01	1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		PNS dan tamu Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	1800 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak		Non-PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	460,090,000.00	460,090,000.00	460,090,000.00	0.00
1	20	1	20	07	01	8800 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah		PNS dan Non-PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk. pinang		100%	100%	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00

Nama Perangkat Daerah: INSPEKTORAT DAERAH																		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Anggaran Tahun 2017										
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target		Pagu Indikatif				
														Sebelum Indikatif perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13 = 12 - 11	
1	20	1	20	07	02		Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	20	1	20	07	02	0700	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya kursi Eselon dan meja, serta kursi Staf		PNS pada Inspektorat Prov.Kep.Babel	Pk.pinang		100%	100%	88,700,000.00	133,842,000.00	133,842,000.00	45,142,000.00
1	20	1	20	07	02	2200	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		Gedung Kantor Inspektorat	Pk.pinang		100%	100%	63,000,000.00	118,000,000.00	178,000,000.00	115,000,000.00
1	20	1	20	07	02	2600	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara baik perlengkapan gedung kantor		Perlengkapan gedung kantor	Pk.pinang		100%	100%	36,600,000.00	36,600,000.00	36,600,000.00	0.00
1	20	1	20	07	02	2800	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara baik peralatan gedung kantor		Peralatan gedung kantor Inspektorat	Pk.pinang		100%	100%	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00
1	20	1	20	07	02	7205	- Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor		PNS pada Inspektorat Prov.Kep.Babel	Pk.pinang		100%	100%	556,450,000.00	556,450,000.00	516,450,000.00	-40,000,000.00
1	20	1	20	07	06		Prog.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	20	1	20	07	06	7210	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra PD tahun 2017-2022, Renja PD tahun 2018 dan Perubahan Renja PD tahun 2017		PNS pada Inspektorat Prov.Kep.Babel	Pk.pinang		100%	100%	55,050,000.00	23,650,000.00	23,650,000.00	-31,400,000.00
1	20	1	20	07	06	7306	- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semester Keuangan PD		Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Pk.pinang		100%	100%	42,825,000.00	42,825,000.00	42,825,000.00	0.00
1	20	1	20	07	020		Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
1	20	1	20	07	020	0100	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya pemeriksaan secara berkala		OPD dan obrik di lingkungan Prov.Kep.Babel	Pk.pinang, Jakarta dan 7 Kab./Kota di Prov. Kep.Babel Prov.Kep. Babel, Jakarta dan 7 Kab./Kota		100%	100%	2,523,584,600.00	2,323,584,600.00	2,323,584,600.00	-200,000,000.00
1	20	1	20	07	020	0200	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan		Obrik (kasus) di lingkungan Pemprov. dan 7 Kab./Kota	Pk.pinang dan Kab. Bangka Tengah		100%	100%	285,040,000.00	155,040,000.00	155,040,000.00	-130,000,000.00
1	20	1	20	07	020	0600	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI		Pemerintah Prov. dan Pemerintah Kab./Kota	Pk.pinang dan Kab. Bangka Tengah		100%	100%	142,118,000.00	142,118,000.00	142,118,000.00	0.00
1	20	1	20	07	020	0700	- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakowasda dan Rakorwasdanas		OPD di lingk. Pemprov dan Inspektorat Kab./Kota	7 Kab./Kota Prov.Kep. Babel, DKI Jakarta, Pk.pinang		100%	100%	299,224,000.00	131,604,000.00	131,604,000.00	-167,620,000.00

Kode										Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Anggaran Tahun 2017														
													Sebelum Indikatif perubahan		Sesudah perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target		Pagu Indikatif					
																Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	KUPA-PPAS	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13 = 12 - 11					
1	20	1	20	07	020	0800	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				Percepatan penyelesaian tindak lanjut secara berkala di lingkungan Pemprov.Kep. Babel dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab./Kota		OPD Provinsi dan Kab./Kota		Prov. Kep. Babel, Jakarta, 7 Kab./Kota			100%	100%	550,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00	20,000,000.00				
1	20	1	20	07	020	1000	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah				Terlaksananya penagihan piutang daerah akibat TPTGR		Bendahara SKPD dan PNS di lingk. Pemprov.Kep. Babel, serta pihak ketiga (perusahaan)		Pk.pinang			100%	100%	632,672,750.00	530,672,750.00	530,672,750.00	-102,000,000.00				
1	20	1	20	07	020	2000	Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD				Terlaksananya penghitungan angka kredit JFA dan P2UPD pada Inspektorat		PNS di lingkungan Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk.pinang			100%	100%	25,000,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00	-1,600,000.00				
1	20	1	20	07	020	4910	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung				Laporan Tim Satgas Saber Pungli tahun 2017		-		Pk.pinang			100%	100%	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00				
1	20	1	20	07	021		Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																				
1	20	1	20	07	021	0100	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang mengikuti diklat		PNS pada Inspektorat Prov. Kep. Babel dan Kab./Kota		Pk.pinang dan Prov. Seluruh Indonesia			100%	100%	500,000,000.00	491,805,250.00	491,805,250.00	-8,194,750.00				
1	20	1	20	07	021	0500	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)				Terlaksananya PKS		Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Prov.		Pk.pinang			100%	100%	93,724,850.00	80,724,850.00	80,724,850.00	-13,000,000.00				
1	20	1	20	07	094		Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																				
1	20	1	20	07	094	0200	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung secara Online				Terlaksananya penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online		SKPD di lingkungan Pemprov. Kep. Babel		Pk.pinang dan Jakarta			100%	100%	329,600,000.00	129,600,000.00	129,600,000.00	-200,000,000.00				
1	20	1	20	07	094	0400	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)				Penyempurnaan dan Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Inspektorat Prov. Kep. Babel		Pk.pinang			100%	100%	149,820,000.00	149,820,000.00	149,820,000.00	0.00				
total																				8,653,899,200	7,796,354,450	7,796,354,450	(857,544,750)				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Anggaran Tahun 2017									
		Sebelum Indikatif perubahan	Sesudah perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target		Pagu Indikatif			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	KUPA-PPAS	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13 = 12 - 11

PROG. PERENCANAAN INSPEKTORAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN (2012 – 2017)						PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERENCANAAN INSPEKTORAT (2018 – 2022)					
SKPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						NAMA PD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN						URUSAN :: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN,					

NO	NAMA PROGRAM (T.A. 2016)	RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA	NO	NAMA PROGRAM (T.A. 2018 – 2019)	RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	√	√	√	√	√
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	1	1	1							
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	1	1	1							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	-	1	1	1							
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	1	1	1	1							
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan	1	1	-	-	-							
7	Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	1	-	-	-	2.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah n Aparatur	√	√	√	√	√
8.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	1	1	1	1							
9.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	1	3.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	√	√	√	√	√
							4.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	√	√	√	√	√
JUMLAH		9	8	7	7	7	JUMLAH		4	4	4	4	4

CATATAN:

- Program No. 1 s.d. 6 pada T.A. 2016/2017, pada Tahun 2018 - 2022 berubah menjadi **kegiatan** dan dimasukkan dalam satu Program (*rutin*) "PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN"
- Program No. 7 s.d. 9 pada T.A. 2016/2017, pada Tahun 2018 s.d. 2022 dihilangkan dan disesuaikan berdasarkan Bidang pada OPD menurut tupoksi masing-masing PD



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Belitung No. 3 Kel Air Hitam, Telp / Fax (0717) 434693
PANGKALPINANG 33149